



**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
(RENJA)  
TAHUN 2023**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814  
Email : [dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com](mailto:dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com)**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II     HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
2.2 Analis Kinerja Pelayanan DP2KBP3A .....	26
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP2KBP3A .....	27
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi .....	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DP2KBP3A .....	34
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1 Program dan Kegiatan.....	35
4.2 Rencana Program dan Kegiatan yang dilakukan Perubahan.....	39
4.3 Pendanaan pada Renja Perubahan Tahun 2023.....	44
4.4 Tabel Rencana Program dan Kegiatan.....	44
<b>BAB V     PENUTUP</b>	
5.1 Pengesahan .....	75

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 merupakan bentuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perubahan SKPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKP, renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Proses penyusunan rancangan perubahan Renja DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 mengacu pada sasaran, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja sebagaimana tercantum perubahan rencana strategis (Renstra) serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

Rancangan Renja Perubahan DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut berdasarkan usulan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut, penyesuaian program dan kegiatan DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut berdasarkan kepada ketersediaan dana Pemerintah Daerah. Renja Perubahan DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja Perubahan

tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);

21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### 1. Maksud :

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### 2. Tujuan :

- a) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
- c) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d) Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD P2KBP3A adalah sebagai berikut :

##### **BAB I. Pendahuluan**

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

##### **BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2021, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun-tahun sebelumnya.

##### **BAB III. Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja SKPD**

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD.

##### **BAB IV. Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra

Hasil kegiatan DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 sampai dengan triwulan II yaitu :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	Perse ntase (%)
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	6.363.030.227	3.016.932.364	
1.a	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	9.999.768	841.250	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.884	841.250	16,83
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.884	0	0
1.b	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	5.311.151.248	2.518.209.963	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.306.151.528	2.516.209.963	47,42
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.999.720	2.000.000	40,00
1.c	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	201.780.128	138.646.402	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.445.923	289.000	8,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.414.910	51.983.500	84,64
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.059.295	1.837.500	14,07
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	1.500.000	50,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.860.000	83.036.402	69,00
1.d	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	178.166.340	37.495.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	114.742.580	11.645.000	10,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.423.760	25.850.000	40,76
1.e	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	522.182.743	270.639.249	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.000.000	39.113.043	39,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.182.743	231.526.205	55,00
1.f	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	139.750.000	51.941.750	

	<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	12.282.500	40,94
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	38.259.250	38,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.750.000	1.430.000	14,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>327.140.605</b>		
2.a	<b>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	18.730.250	8.920.000	
	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	18.730.250	8.920.000	48,00
2.b	<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	308.410.355	62.296.817	
	Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	16.140.218	8.125.870	50,35
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	77.016.957	17.042.440	22,13
	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga	113.400.000	0	0
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	101.853.180	37.128.507	36,00
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>5.941.346.256</b>		
3.a	<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk danKB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	1.068.528.670	421.889.650	
	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	120.000.000	54.000.000	45,00
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	120.000.000	54.000.000	45,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	137.500.000	26.450.000	19,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	523.560.000	173.970.250	33,00
	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	17.000.000	21,00
3.b	<b>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	1.820.320.000	620.540.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	38.000.000	5.200.000	14,00
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.782.320.000	615.340.000	35,00
3.c	<b>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk</b>	1.885.487.586	<b>188.086.585</b>	

	<b>jaringan dan jejaringnya Dinas P2KBP3A</b>			
	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.590.400	12.700.000	59,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Dinas P2KBP3A	518.729.020	167.924.145	32,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.307.8050726	0	0
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	29.515.000	1.640.000	6,00
	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	7.847.440	5.822.440	74,00
3.d	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	1.167.010.000	84.090.000	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	812.350.000	0	0
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	354.660.000	84.090.000	24,00
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	2.430.436.259		
4.a	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	2.430.436.259	357.602.890	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	581.990.005	0	0
	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32.251.374	0	0
	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14.687.440	11.267.440	77,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.682.100.000	335.058.010	20,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	104.720.000	0	

	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14.587.440	11.267.440	77,00
5	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	554.789.617		
5.a	<b>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	54.799.790	0	0
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	54.799.790	0	0
	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	499.989.881	106.173.606	21,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	499.989.881	106.173.606	21,00
6	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	33.126.140		
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<b>9.143.600</b>	3.028.080	
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.143.600	3.028.080	33,00
6.b	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>23.982.540</b>	2.296.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	23.982.540	2.296.000	9,57
7	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>91.398.340</b>		
7.a	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>91.398.340</b>	14.698.660	16,08
	Koordinasi dan Sikronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.398.340	14.698.660	16,08
8	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	45.837.958		
8.a	<b>Kegiatan Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>45.837.958</b>	<b>17.989.257</b>	<b>39,00</b>
	Sub Kegiatan Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.837.958	17.989.257	39,00
<b>TOTAL</b>				

Secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja DP2KBP3A sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sampai dengan dapat diuraikan sebagai berikut :

## EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Sampai Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	10(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70.10		68,46				



							<b>Kabupaten/Kota</b>							
2	08	02	2	03	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas			2.000 Orang	539	27%		
2	08	03				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>	<b>70.10</b>						
2	08	03	2	01		<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Kasus Perempuan yang Ditangani</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
2	08	03	2	01	02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			25 Perangkat Daerah	3	12%		
						<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat</b>	<b>Persentase Kasus Perempuan yang Ditangani</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				

					<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>								
					Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik			10 Orang	6	60%		
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)</b>	<b>700 Skor</b>		<b>700 Skor</b>				
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>06</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>06</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>02</b> Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	0	0		
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>07</b>			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN</b>	<b>Skor Capaian Kota</b>	<b>700</b>		<b>700 Skor</b>				

					<b>KHUSUS ANAK</b>	<b>Layak Anak (KLA)</b>	<b>Skor</b>						
2	08	07	2		<b>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
2	08	07	2		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Orang	18	60%		
2	14				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								
2	14	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP SKPD</b>	<b>75 skor</b>		<b>75 skor</b>				

2	14	01	2	01		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>					
2	14	01	2	01		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	1	14,29%			
2	14	01	2	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	0	0			
2	14	01	2	02		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>					
2	14	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan		25 orang/bulan		50%			
2	14	01	2	02		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	0	0			
2	14	01	2	06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>					

							<b>Daerah</b>							
2	14	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0	0		
2	14	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100%		
2	14	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%		
2	14	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2	14	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50%		
2	14	01	2	07		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				



2	14	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%		
2	14	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			6 Unit	4 Unit	50%		
2	14	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			23 Unit	4 Unit	14%		
2	14	02				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk</b>			<b>1,56%</b>				
2	14	02	2	01		<b>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian</b>	<b>Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>				

						<b>Kuantitas Penduduk</b>	<b>rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>							
2	14	02	2	01	05	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	jumlah Dokumen Penguatan kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			2 Dokumen	1 Dokumen	50%		
2	14	02	2	02		<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>				
2	14	02	2	02	08	Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah data Kependudukan di Kampung KB untuk memepkuat integritas Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di sektor lain yang dibentuk			2 Unit	1 Unit	50%		
2	14	02	2	02	09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan			11 Laporan	1 Laporan	9%		

						Informasi Keluarga	Sistem Informasi Keluarga							
2	14	02	2	02	1 2	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			12 Laporan	0 Laporan	0		
2	14	02	2	02	1 3	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			12 Laporan	4 Laporan	33.34%		
2	14	03				<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</b>	<b>2,22</b>						
2	14	03	2	01		<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
2	14	03	2	01	0 3	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan			12 Organisasi	6 Organisasi	50%		

							Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							
2	14	03	2	01	04	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan			1 Dokumen	0 Dokumen	0		
2	14	03	2	01		Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			12 Laporan	6 Laporan	50%		
2	14	03	2	01		Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan			12 Laporan	6 Laporan	50%		

							KKBPK							
2	14	03	2	01		Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			12 Laporan	6 Laporan	50%		
2	14	03	2	02		<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>				
2	14	03	2	02		Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			12 Organisasi	6 Organisasi	50%		
2	14	03	2	02	04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	556 Orang		556 Orang		300 Orang		

2	14	03	2	03		<b>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengendalian Alat, Obat Kontrasepsi (ALOKON) dan Pelayanan KB</b>	<b>100 %</b>						
2	14	03	2	03		Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			79 Laporan	48 Laporan	60,70%		
2	14	03	2	03	03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1171 Orang	486 Orang	40 %		
						Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			10 Unit	0 Unit	0 %		
2	14	03	2	03	08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk			90 Laporan	18 Laporan	20 %		



							Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB							
2	14	04					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Angka Menurunnya Kelahiran Total (TFR) Per Wus</b>	<b>2,22</b>					
2	14	04	2	01			<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>			
							Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			33 Unit	0 Unit	0	
2	14	04	2	01	03		Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan			1 Laporan	0 Laporan	0	

						Keluarga/UPPKS)	Ekonomi Keluarga/UPPKS)							
2	14	04	2	01	0 4	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			33 Orang	33 Orang	100%		
						Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			801 Orang (801 orang / 3 bulan, untuk 10 bulan (mar - des))	801 Orang	60 %		

						Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			11 Kelompok	10 Kelompok	90,91%		
2	14	04	2	01	07	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			3 Laporan	2 Laporan	66,67%		

Berdasarkan hasil capaian kinerja dengan Triwulan II Tahun 2023, terdapat catatan penting antara lain :

1. Beberapa Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/ hasil keluaran yang direncanakan .
2. Program/Kegiatan yang tidak tercapai disebabkan oleh :
  - Kegiatan di jadwalkan pada triwulan 3 dan 4
  - Kegiatan belum dilaksanakan karena menyesuaikan anggaran kas

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas

- e. Pembinaan UPT Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk, dalam pencapaian target terdapat beberapa masalah yaitu :
  - a) Rendahnya kesadaran masyarakat pada PUS dalam ber KB
  - b) Peserta KB masih di dominasi perempuan
  - c) Tingginya pernikahan remaja (< 14 tahun, 15-19 tahun)
  - d) Rendahnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), KB MKJP kurang diminati dan dipahami oleh masyarakat
  - e) Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun menggunakan alat kontrasepsi yang kurang efektif (Non MKJP).
  - f) Angka Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi diatas target yaitu 9%
2. Tingginya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun) dalam pencapaian target terdapat masalah pada Kepesertaan masyarakat dalam ber- KB belum optimal dengan akar masalah yaitu :
  - a) Eksternal
    - Penguatan advokasi dan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) pelaksanaannya masih menemui permasalahan antara lain :
      - Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program Bangga Kencana, yaitu terkait kelembagaan , kebijakan, perencanaan

- Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga yaitu TFR 2,32 tahun 2021 angka ini belum mencapai target yang diinginkan yaitu 2,27.
  - Pelaksanaan Advokasi dan KIE belum efektif ditandai dengan pengetahuan masyarakat tentang KB dan alat kontrasepsi dan pasangan usia subur /PUS tidak diikuti dengan dengan menjadi peserta KB.
  - Peran tenaga lapangan KB dan bidan dalam konseling KB belum optimal
  - Masih belum optimalnya penyampaian informasi mengenai program Bangga Kencana
- b) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB
- Angka pemakaian kontrasepsi cara modern belum meningkat secara signifikan
  - Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) cukup tinggi
  - Penggunaan alat dan obat metode kontrasepsi jangka pendek (non MKJP) terus meningkat sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah
- c) Pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga belum meningkat ditandai dengan 1) masih banyaknya perkawinan diusia muda 2. Angka kelahiran pada pada perempuan remaja usia 15 – 19 tahun cukup tinggi.
- d) Pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah
  - Partisipasi dan pemahaman dan kesadaran keluarga / orang tua yang memiliki remaja masih rendah

- Kualitas hidup lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia belum optimal
  - Kelompok kegiatan (Poktan) terdiri dari BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKA belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber KB
- e) Faktor SDM yaitu terbatasnya Tenaga Penyuluh KB yang ada, seharusnya satu Penyuluh KB menangani satu desa namun kondisi saat ini satu Penyuluh KB menangani 3 sampai 4 Desa
- f) Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan program Bangga Kencana belum optimal.
3. Belum Optimalnya Kesenjangan Gender dalam pencapaian target terdapat beberapa masalah yaitu : rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, tingginya persentase perempuan yang bekerja di sektor informal, tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, dan tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan (termasuk perkawinan usia anak dan praktek-praktek berbahaya terhadap perempuan/anak perempuan), serta Belum tersedianya basis data akurat terkait dengan data terpilah atau data responsif gender dan anak untuk dipergunakan dalam perencanaan penganggaran yaitu Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
4. Belum tercapainya skor kota layak anak dalam pencapaian target terdapat beberapa masalah yaitu : rendahnya tingkat partisipasi Dunia usaha, lembaga masyarakat, termasuk perkawinan usia anak dan praktek-praktek berbahaya terhadap anak perempuan, belum semua sekolah dan puskesmas dan instansi pemerintah di desain ramah terhadap anak..

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu : (1). Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

##### **3.1.1 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Akhir tahun 2019 BKKBN mengemas dan memperkenalkan istilah Program KKBPK menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi Bangsa Kencana. Perubahan nama dari KKBPK menjadi Bangsa Kencana tersebut bertujuan untuk memudahkan penyebutan program, yang seringkali agak sulit untuk diucapkan. Peletakan kata Pembangunan Keluarga di depan menunjukkan bahwa BKKBN merupakan lembaga yang ingin memberikan manfaat kepada seluruh keluarga Indonesia. Selain itu, BKKBN harus dapat mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik atau mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV

2020-2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan dalam 3 Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; (1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan (2) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.2
- 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP; (1) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan (2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Sedangkan pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, BKKBN memiliki peran pada PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP pada Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter.

Tahun 2021 sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 juga menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Wakil Presiden menjadi Ketua Pengarah yang didampingi oleh Menteri

Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya. Sedangkan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana. Tim Percepatan Penurunan Stunting juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.

### **3.1.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) **Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan**, mencakup: (a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b) percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.
- 2) **Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO**, mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi; b) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku

kepentingan lainnya tentang KtP dan TPPO; c) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tentang KtP dan TPPO; d) penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; e) pengembangan sistem data terpadu KtP dan TPPO; f) pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO; g) penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum; dan h) pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan KtP dan TPPO.

- 3) **Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya**, mencakup: a) penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, dan j) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Tanah Laut sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mewujudkan **3 (Misi)** yaitu :

1. **Misi ke 1 (Satu)** yaitu Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Masyarakat yang Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
2. **Misi ke 3 (Tiga)** yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
3. **Misi ke 5 (Lima)** yaitu Membangun Sinergitas yang Baik antar Tingkat Pemerintahan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;

**BAB IV**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT**  
**DAERAH**

**4.1 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bersumber dari Dana APBD terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
    - i. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - ii. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - ii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - i. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - iii. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - iv. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - v. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik
    - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - i. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
    - ii. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - iii. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Pengendalian Penduduk
- a. Kegiatan Pemanduan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
    - i. Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidik Formal
  - b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - i. Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi/ Program KKBPK di Sektor Lain
    - ii. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
    - iii. Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga
    - iv. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana
- a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

- i. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja
  - ii. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
  - iii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
  - iv. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
  - v. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK
- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- i. Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
  - ii. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya Dinas P2KBP3A
- i. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - ii. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Dinas P2KBP3A
  - iii. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
  - iv. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - v. Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan

- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  - i. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
  - ii. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
- 4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
    - i. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
    - ii. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
    - iii. Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
    - iv. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
    - v. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
    - vi. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  - a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- i. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
  - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - i. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6. Program Perlindungan Perempuan
  - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - i. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - i. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- 7. Program Pemenuhan Hak Anak
  - a. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
    - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 8. Program Perlindungan Khusus Anak
  - a. Kegiatan Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - i. Sub Kegiatan Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

#### **4.2 Rencana Program dan Kegiatan yang dilakukan Perubahan**

Beberapa Kegiatan mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 5,306,151,528  
Setelah perubahan menjadi Rp. 5,106,151,528  
Alasan perubahan : pergeseran beberapa rincian belanja
- b. Kegiatan Admisitrasi Umum Perangkat Daerah
- i. Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan/Material  
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 0,-  
Setelah perubahan menjadi Rp. 9,985,209 ,-  
Alasan perubahan : penambahan untuk pameran hari jadi Tanah Laut.
  - ii. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 120,860,000,-  
Setelah perubahan menjadi Rp. 245,860,000,-  
Alasan perubahan :
    - penambahan untuk belanja makan minum rapat
    - penambahan perjalanan dinas
    - pergeseran belanja dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 31.000.000
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik  
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 101,000,000 ,-  
Setelah perubahan menjadi Rp. 113,000,000,-  
Alasan perubahan : untuk penambahan pembayaran rekening listrik dan air
  - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 421,182,743,-  
Setelah perubahan menjadi Rp. 455,006,661,-

Alasan perubahan : Penambahan untuk honorarium, asuransi Kesehatan dan tenaga kerja PTT bulan Desember 2023

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

i. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 0,-

Setelah perubahan menjadi Rp. 99,984,764,-

Alasan perubahan : Balai penyuluh KB Kurau perlu rehab berat di bagian teras dan rehab Gudang arsip

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana

a. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya Dinas P2KBP3A

i. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Dinas P2KBP3A

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 518,729,020,-

Setelah perubahan menjadi Rp. 548,723,504,-

Alasan perubahan : Penambahan jasa komplikasi, penambahan akseptor MOW, Oreintasi kemampuan dokter melaksanakan MOP

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

i. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 581,990,005,-

Setelah perubahan menjadi Rp. 477,322,033,-

Alasan perubahan : penyesuaian harga BKB Kit Stunting.

- ii. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  
 Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 32,251,374,-  
 Setelah perubahan menjadi Rp. 47,251,374,-  
 Alasan perubahan : untuk pembinaan PIK R, Sosialisasi INI GENTING dan untuk mendukung penurunan stunting
- iii. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  
 Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 14,687,440,-  
 Setelah perubahan menjadi Rp. 34,668,520,-  
 Alasan perubahan : Pelatihan untuk UPPKA Kelompok Binaan, orientasi pengolahan atau pembuatan makanan local untuk ketahanan keluarga dan atasi stunting.
- iv. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  
 Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 1,682,100,000,-  
 Setelah perubahan menjadi Rp. 1,806,810,000,-  
 Alasan perubahan : orientasi untuk TPK, belanja perjalanan dinas, makan minum kegiatan, pendampingan input data elsimile untuk TPK.

#### 4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
  - i. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG  
 Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 54,799,790,-  
 Setelah perubahan menjadi Rp. 49,562,505,-

Alasan perubahan : pengurangan makan minum rapat dan perjalanan dinas

b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

ii. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 499,989,881,-

Setelah perubahan menjadi Rp. 467,675,545,-

Alasan perubahan : pengurangan belanja perjalanan dinas luar daerah

5. Program Perlindungan Perempuan

a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

i. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 9,143,600,-

Setelah perubahan menjadi Rp. 27,946,140,-

Alasan perubahan : penambahan belanja makan minum kegiatan, perjalanan dinas, souvenir untuk masyarakat.

b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

ii. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 23,982,540,-

Setelah perubahan menjadi Rp. 38,825,040,-

Alasan perubahan : penambahan belanja tenaga ahli, perjalanan dinas pendampingan kasus dan penanganan kasus.

6. Program Perlindungan Khusus Anak

a. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 45.837.958,-

Setelah perubahan menjadi Rp. 91,398,340,-

Alasan perubahan : penambahan belanja tenaga ahli, prrijalan dinas pendampingan kasus dan penanganan kasus, serta pembuatan baliho

**4.3 Pendanaan pada Renja Perubahan Tahun 2023**

Pendanaan daerah untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut 2023 yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

**4.4 Tabel Rencana Program dan Kegiatan**

Tabel rencana Program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

**RENCANA KERJA DAN  
PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH**

**Formulir  
RKPA-BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023

Organisasi :2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
2	08				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				725,152,109	0	0	0	725,152,109	758,140,528	0	0	0	758,140,528	32.988.419		
2	08	02			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				554,789,671	0	0	0	554,789,671	517,238,050	0	0	0	517,238,050	(37.551.621)		
2	08	02	2.01		<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				54,799,790	0	0	0	54,799,790	49,562,505	0	0	0	49,562,505	(5.237.285)		

2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,799,790	0	0	0	54,799,790	49,562,505	0	0	0	49,562,505	(5.237.285)
2	08	02	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>499,989,881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499,989,881</b>	<b>467,675,545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467,675,545</b>	<b>(32.314.336)</b>
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	499,989,881	0	0	0	499,989,881	467,675,545	0	0	0	467,675,545	(32.314.336)

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Perempuan dan Perlindungan Anak)															
2	08	03			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				33,126,140	0	0	0	33,126,140	66,771,180	0	0	0	66,771,180	33.645.040	
2	08	03	2.01		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				9,143,600	0	0	0	9,143,600	27,946,140	0	0	0	27,946,140	18.802.540	
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,143,600	0	0	0	9,143,600	27,946,140	0	0	0	27,946,140	18.802.540	
2	08	03	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				23,982,540	0	0	0	23,982,540	38,825,040	0	0	0	38,825,040	14.842.500	

2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23,982,540	0	0	0	23,982,540	38,825,040	0	0	0	38,825,040	14.842.500
2	08	06			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>			<b>91,398,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,398,340</b>	<b>91,398,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,398,340</b>	<b>0</b>	
2	08	06	2.02		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>91,398,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,398,340</b>	<b>91,398,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,398,340</b>	<b>0</b>	
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua	91,398,340	0	0	0	91,398,340	91,398,340	0	0	0	91,398,340	0	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1	
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						Bertambah/ (Berkurang)
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)		Kelurahan													
2	0	0			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>				45,837,958	0	0	0	45,837,958	82,732,958	0	0	0	82,732,958	36.895.000	
2	0	0	2.0		<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				45,837,958	0	0	0	45,837,958	82,732,958	0	0	0	82,732,958	36.895.000	
2	0	0	2.0	0	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45,837,958	0	0	0	45,837,958	82,732,958	0	0	0	82,732,958	36.895.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,999,884	0	0	0	4,999,884	4,999,884	0	0	0	4,999,884	0	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>5,311,151,248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,311,151,248</b>	<b>5,111,151,248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,111,151,248</b>	<b>(200.000.000)</b>	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,306,151,528	0	0	0	5,306,151,528	5,106,151,528	0	0	0	5,106,151,528	(200.000.000)	

2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,999,720	0	0	0	4,999,720	4,999,720	0	0	0	4,999,720	0
---	----	----	------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------	---

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	14	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>201,780,128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201,780,128</b>	<b>336,765,337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336,765,337</b>	<b>134.985.209</b>	
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,445,923	0	0	0	3,445,923	3,445,923	0	0	0	3,445,923	0	

2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		61,414,910	0	0	0	61,414,910	61,414,910	0	0	0	61,414,910	0
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13,059,295	0	0	0	13,059,295	13,059,295	0	0	0	13,059,295	0
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0

2	14	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua			0	0	0	0	0	9,985,209	0	0	0	9,985,209	9.985.209	
---	----	----	------	----	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------	--	--	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	-----------	-----------	--

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)		Kelurahan														
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120,860,000	0	0	0	120,860,000	245,860,000	0	0	0	245,860,000	125.000.000		
2	14	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>0</b>	<b>178,166,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178,166,340</b>	<b>0</b>	<b>207,026,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207,026,340</b>	<b>28.860.000</b>		

2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	114,742,580	0	0	114,742,580	0	114,742,580	0	0	114,742,580	0
2	14	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	63,423,760	0	0	63,423,760	0	92,283,760	0	0	92,283,760	28.860.000
2	14	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>520,312,743</b>	<b>1,870,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522,182,743</b>	<b>568,006,661</b>	<b>1,870,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569,876,661</b>	<b>47.693.918</b>

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah															
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1			
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		101,000,000	0	0	0	101,000,000	113,000,000	0	0	0	113,000,000	12,000,000	
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		419,312,743	1,870,000	0	0	421,182,743	455,006,661	1,870,000	0	0	456,876,661	35,693,918	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>139,750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,750,000</b>	<b>139,750,000</b>	<b>99,984,764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239,734,764</b>	<b>99,984,764</b>	

2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0
---	----	----	------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--	------------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	------------	---

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
								T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)								
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	

2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,750,000	0	0	0	9,750,000	9,750,000	0	0	0	9,750,000	0
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas	0	0	0	0	0	0	99,984,764	0	0	99,984,764	99.984.764
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>			<b>327,140,605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327,140,605</b>	<b>327,140,605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327,140,605</b>	<b>0</b>
2	14	02	2.01		<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>			<b>18,730,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,730,250</b>	<b>18,730,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,730,250</b>	<b>0</b>

2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18,730,250	0	0	0	18,730,250	18,730,250	0	0	0	18,730,250	0
---	----	----	------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--	------------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	------------	---

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)																
2	14	02	2.02		<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>308,410,355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308,410,355</b>	<b>308,410,355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308,410,355</b>	<b>0</b>		
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16,140,218	0	0	0	16,140,218	16,140,218	0	0	0	16,140,218	0		

					Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)														
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKBKB	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77,016,957	0	0	0	77,016,957	77,016,957	0	0	0	77,016,957	0
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKBKB	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		113,400,000	0	0	0	113,400,000	113,400,000	0	0	0	113,400,000	0
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dinas Pengendalian	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua		101,853,180	0	0	0	101,853,180	101,853,180	0	0	0	101,853,180	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	DAK Non Fisik-BOKBKB	Kelurahan														
2	14	03			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>				4,640,056,841	1,301,289,415	0	0	5,941,346,256	4,670,702,956	1,372,541,263	0	0	6,043,244,219	101.897.963		
2	14	03	2.01		<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>				1,068,528,670	0	0	0	1,068,528,670	1,068,528,670	0	0	0	1,068,528,670	0		
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKBKB	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120,000,000	0	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0		

2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKBKB	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	207,468,670	0	0	0	207,468,670	207,468,670	0	0	0	207,468,670	0
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKBKB	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137,500,000	0	0	0	137,500,000	137,500,000	0	0	0	137,500,000	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Perempuan dan Perlindungan Anak)															
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik- BOKBKB	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		523,560,000	0	0	0	523,560,000	523,560,000	0	0	0	523,560,000	0	
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBP (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik- BOKBKB	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	



Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T - 1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah / (Berkurang)	T+ 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	1	0	2.0		<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>				584,198,171	1,301,289,415	0	0	1,885,487,586	614,844,286	1,372,541,263	0	0	1,987,385,549	101.897.963	
2	1	0	2.0	0	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKBKB	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21,590,400	0	0	0	21,590,400	21,590,400	0	0	0	21,590,400	0	

2	143	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKBKB	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		518,729,020	0	0	0	0	518,729,020	548,723,504	0	0	0	548,723,504	29.994.484
2	143	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Penugasan-Keluarga Berencana	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,516,311	1,301,289,415	0	0	1,307,805,726	7,167,942	1,372,541,263	0	0	0	1,379,709,205	71.903.479
2	143	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua		29,515,000	0	0	0	29,515,000	29,515,000	0	0	0	0	29,515,000	0



					Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)													
2	14	03	2.04		<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>		<b>1,167,010,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,167,010,000</b>	<b>1,167,010,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,167,010,000</b>	<b>0</b>	
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKBKB	812,350,000	0	0	0	812,350,000	812,350,000	0	0	0	812,350,000	0	

2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKBKB	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					354,660,000	0	0	0	354,660,000	354,660,000	0	0	0	354,660,000	0
---	----	----	------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--	--	--	--	-------------	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	-------------	---

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	14	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>				2,430,436,259	0	0	0	2,430,436,259	2,380,739,367	0	0	0	2,380,739,367	(49.696.892)	
2	14	04	2.01		<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>				2,430,436,259	0	0	0	2,430,436,259	2,380,739,367	0	0	0	2,380,739,367	(49.696.892)	

2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	581,990,005	0	0	0	581,990,005	477,322,033	0	0	0	477,322,033	(104.667.972)
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,251,374	0	0	0	32,251,374	47,251,374	0	0	0	47,251,374	15.000.000

					Anak)														
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,687,440	0	0	0	14,687,440	14,687,440	0	0	0	14,687,440	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)															
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKBKB	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,682,100,000	0	0	0	1,682,100,000	1,806,810,000	0	0	0	1,806,810,000	124.710.000	

2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKBKB	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104,720,000	0	0	0	104,720,000	0	0	0	0	0	(104.720.000)
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,687,440	0	0	0	14,687,440	34,668,520	0	0	0	34,668,520	19.981.080

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				I (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)															

Pelaihari, September 2023

Plt. Kepala,



**EKO TRIANTO, S.Sos**  
NIP.196706011994011002

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan dan karyawan DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dalam memantau dan mengarahkan perkembangan penyusunan dokumen Renja.

**Pelaihari, September 2023**

**Plt. Kepala**



**EKO TRIANTO, S.Sos**  
**NIP.196706011994011002**